

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Indeks daya saing bangsa Indonesia terus mengalami perbaikan. Berdasarkan data yang dilansir oleh World Economic Forum (2011, hlm. 18) dalam Global Competitiveness Report 2013-2014, Indonesia menempati peringkat 38 dari 148 Negara, sedang pada 2012-2013 Indonesia menempati posisi 50.

Meski berhasil naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya, Indonesia tentu tak bisa berbangga diri. Pasalnya, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih menempati peringkat kelima. Empat negara yang berada di atas Indonesia ditempati oleh Singapura (urutan 2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (26) dan Thailand (37). Enam negara lainnya yang berada di bawah Indonesia ditempati oleh Filipina (urutan 59), Vietnam (70), Laos (81), Kamboja (88) dan Myanmar (139). Sedangkan sepuluh besar teratas dalam Global Competitiveness Index 2013-2014 ditempati oleh Swiss, Singapura, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Swedia, Hongkong, Belanda, Jepang dan Inggris.

Indeks daya saing bangsa Indonesia sangat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sedangkan Indeks Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia saat ini berada di urutan ke-53 dari 122 negara di dunia berdasarkan pengukuran Forum Ekonomi Dunia (2013, hlm. 5) yang dikeluarkan Selasa (1/10/2013) di Jenewa, Swiss mengemukakan :

Dalam pengukuran Indeks Sumber Daya Manusia tersebut berdasarkan 4 pilar indikator pengukuran antara lain :

1. Pilar Kesehatan dan Kesejahteraan yang berisi indikator yang berhubungan dengan populasi kesehatan fisik dan mental, dari usia anak-anak hingga dewasa.
2. Pilar Pendidikan yang merujuk pada hubungan aspek-aspek pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif dari pendidikan tingkat dasar, menengah hingga tinggi, dan berisi informasi baik ketersediaan tenaga kerja saat ini dan juga di masa depan.
3. Pilar Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja yang didesain untuk mengukur tingkat pengalaman, bakat, pengetahuan dan pelatihan dalam satu negara pada populasi usia tenaga kerja produktif.

4. Pilar Dukungan Lingkungan yang menangkap faktor kerangka hukum, infrastruktur dan lainnya yang memungkinkan pengembalian modal manusia.

Dari beberapa indikator pengukuran Indeks Sumber Daya Manusia tersebut di antara bagaimana menciptakan kualitas warga negara yang berkualitas baik dari sudut kesehatan dan pendidikan. Ditinjau dari sudut proses kejadian manusia menuju kedewasaan, manusia yang berkualitas adalah manusia yang bertanggung jawab.

Kualitas sumber daya manusia sebagai warganegara dapat dibangun oleh keluarga yang sejahtera. Untuk membangun keluarga sejahtera maka diperlukan perencanaan dalam membangun keluarga. Salah satu bentuk perencanaan keluarga adalah merencanakan pernikahan di usia yang matang (dewasa) secara kesehatan produksi, ekonomi, psikologi, dan legal. Diharapkan pasangan yang melakukan pernikahan pada usia matang (dewasa) maka membangun anggota keluarga yang berkualitas.

Agar anggota masyarakat—terutama remaja yang belum dewasa tidak terburu-buru untuk menikah di usia muda diperlukan sosialisasi dan internalisasi akan pentingnya usia pernikahan yang matang untuk membangun keluarga sejahtera. Peran untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada remaja agar tidak melakukan perkawinan dini atau muda merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang berperan melakukan sosialisasi dan internalisasi pernikahan usia matang adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Organisasi Kemasyarakatan, PKK diharapkan dapat berperan untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam

mewujudkan pembangunan partisipatif. Kader PKK juga ikut terlibat dalam penyuksesan program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), atau Bina Keluarga Remaja (BKR) yang leading sektor-nya BKKBN.

Menurut Ahamudy (2004, hlm.2) Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih rendahnya usia perkawinan pertama penduduk. Tingginya angka kelahiran erat kaitannya dengan usia kawin pertama dengan pembentukan keluarga kecil yang berkualitas. Median usia kawin pertama di Indonesia adalah 18,6 tahun. Median usia kawin pertama di perdesaan lebih rendah yaitu 17,9 tahun, sedangkan di daerah perkotaan adalah 20,4 tahun. Tingginya angka kelahiran ini juga disebabkan karena sebagian kelompok masyarakat dan keluarga belum menerima dan menghayati norma keluarga kecil sebagai landasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Demikian juga masih rendahnya usia pernikahan pertama penduduk terjadi di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Tidak remaja belia yang baru keluar dari SD dan SLTP yang sudah menikah. Kondisi menimbulkan pertanyaan sejauh mana peran PKK dalam upaya mengurangi maraknya usia kawin pertama penduduk yang rendah di desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan dengan judul “Peran PKK dalam pendewasaan usia perkawinan bagi peningkatan kualitas kewarganegaraan (Studi kasus di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat)”.

B. Identifikasi masalah penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mencoba untuk menjabarkan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya :

1. Masalah kesadaran warga desa jayamekar Kecamatan Padalarang mengenai usia perkawinan pertama
2. Tugas PKK dalam pendewasaan usia perkawinan di Desa Jaya Mekar
3. Persoalan yang dihadapi PKK dalam pendewasaan usia perkawinan di Desa Jayamekar

C. Rumusan masalah penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Peran apa yang dilakukan oleh PKK dalam pendewasaan usia perkawinan di Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PKK dalam pendewasaan usia perkawinan di Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana kualitas kewarganegaraan keluarga yang menikah dibawah umur?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran PKK untuk meningkatkan kesadaran warga dalam peningkatan usia perkawinan pertama warga Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat .

Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan deskripsi data tentang peran apa saja yang sudah dilakukan oleh PKK dalam pendewasaan usia perkawinan pada warga Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
2. Mendapat deskripsi data tentang hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PKK dalam pendewasaan usia perkawinan pada warga Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus. Kasus dalam penelitian adalah peran dan upaya-upaya dilakukan oleh PKK dalam meningkatkan kesadaran warga tentang pendewasaan usia pernikahan di Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dengan pendekatan kasus ini, penulis merancang penelitian sebagai berikut:

1. Langkah pertama yang penulis lakukan dalam penelitian adalah melakukan observasi pendahuluan untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan.
2. Setelah teridentifikasi dan terumuskan masalah, melakukan kajian pustaka untuk merancang pedoman wawancara dan studi dokumentasi.
3. Merancang situasi sosial yang akan menjadi fokus kajian penelitian baik aktivitas, tempat, dan aktor dalam peran dan upaya-upaya PKK dalam pendewasaan usia perkawinan.
4. Selanjutnya, penulis merancang pedoman wawancara sesuai rumusan masalah yang sudah ditetapkan dalam Bab I.
5. Di samping merancang pedoman wawancara, menentukan narasumber yang diwawancarai sebagai informan, kegiatan-kegiatan dan tempat-tempat yang akan diobservasi.
6. Setiap hasil wawancara dengan narasumber dan hasil observasi dicatat dalam buku catatan penelitian.
7. Setelah data yang diperoleh jenuh maka langkah selanjutnya melakukan pengolahan dan analisis data.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut diantaranya :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model teoritik peran organisasi kemasyarakatan terutama PKK untuk meningkatkan kesadaran warga tentang usia perkawinan dalam rangka peningkatan kualitas kewarganegaraan. Demikian secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep organisasi kemasyarakatan, kesadaran warga, dan kualitas kewarganegaraan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan kepada pemerintah untuk membina PKK, dapat memberikan pedoman bagi PKK dalam menjalankan peran-perannya terutama peran dalam pendewasaan usia perkawinan.

G. Struktur organisasi skripsi

Judul

Halaman pengesahan

Pernyataan mengenai maksud penelitian karya ilmiah

Nama dan kedudukan tim pembimbing

Pernyataan tentang keaslian karya ilmiah

Kata Pengantar

Ucapan terima kasih

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan

Bab II Kajian Pustaka

Bab III Metode Penelitian

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Daftar Pustaka

Lampiran